BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah SWT yang secara horizontal merupakan makhluk sosial yang senantiasa bekerja sama serta tidak lepas dari hubungan muamalah (kerja sama) dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain yang tidak bisa di abaikan.

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah Swt yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Cara yang ditempuh dalam mencari karunia itu adalah dengan usaha dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Tetapi dalam usaha dan kerja sama tersebut hendaklah didasari dengan akad atau perjanjian yang telah di sepakati bersama.

Salah satu hasil karunia dari Allah SWT adalah adanya tanaman kelapa sawit yang dapat di dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang kebutuhan hidup sehari – hari. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting dalam sektor pertanian umumnya, dan sektor perkebunan khususnya. Hal ini disebabkan karena dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak, kelapa sawit yang menghasilkan

nilai ekonomi terbesar per hektar di dunia. Kelapa sawit merupakan komoditi andalan Indonesia yang perkembangannya demikian pesat.

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kebutuhan terhadap minyak kelapa sawit dalam negeri. Dengan demikian investasi dibidang perkebunan khususnya kelapa sawit mempunyai peluang yang baik untuk dikembangkan.

Fiqih muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan di taati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan –aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Salah satu kegiatan muamalah adalah kerjasama atau mudharabah.

Kerjasama dalam muamalah disebut syirkah. Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil dalam muamalah adalah mudharabah. Mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua atau lebih.

Islam membolehkan kepada para pemilik modal untuk mengadakan syirkah dalam usaha, baik berupa perusahaan, perdagangan dan sebagainya. Sebab diantara seseorang itu di nilai kecil apabila sendirian. Tetapi dinilai besar kalau bersama yang lain (Qardhawi 2007:277).

Meskipun dalam perjanjian syirkah hasilnya belum dapat dipastikan dan masih perkiraan yaitu dalam bentuk presentase namun hukum perjnjian islam tetap, menekankan perlunya kesimbangan, baik keseimbangan antara yang

diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko (Anwar 2010:90).

Dibolehkannya kerja sama pelaksanaan bagi hasil telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekan oleh bangsa arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang. Ia melakukan mudharabah dengan khadijah. Dengan demikian, tinjauan dari fiqih muamalah, maka praktek mudharabah ini dibolehkan (Hendi Op 139).

Selain itu, dalam perjanjian syirkah pembagian keuntungan masing – masing anggota serikat nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 20 %, 10 %, 30 %, karena keuntungan merupakan salah satu *ma'qud 'alaih* (Muslich 2010:353).

Siak salah satu Kabupaten terbesar yang memiliki wilayah Kecamatan dan memiliki lahan yang sangat luas yang terbagi dari beberapa Desa. Siak merupakan Kabupaten yang banyak melakukan perjanjian sistem bagi hasil, ini dikarenakan sebagian besar penduduk hidup dengan mata pencarian bertani. Hal ini berarti bahwa sebagian besar rakyat menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Sebagai wilayah yang agraris masyarakat berusaha dalam memantapkan pembangunan dibidang perkebunan. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Siak adalah Kecamatan Dayun. Kecamatan Dayun merupakan salah satu sektor penghasil kelapa sawit yang cukup mendominasi di Kabupaten Siak. Umumnya masyarakat yang tinggal di Kecamatan Dayun memiliki kebun kelapa sawit. Masyarakat Desa yang ada berawal dari penduduk yang ada di daerah Jawa yang mengikuti program transmigrasi.

Di kecamatan Dayun terdiri dari 11 Desa di antaranya adalah ada Desa Banjar Seminai, Desa Berumbang Baru, Desa Buana Makmur, Desa Dayun, Desa Lubuk Tilan, Desa Merangkai, Pangkalan Makmur, Sawit Permai, Sialang Sakti, Suka Mulya dan Desa Taluk Merbau (Indonesia.go.id) yang mana dari tiga Desa memiliki lahan luas kelapa sawit di antaranya Desa Talu Merbau, Desa Dayun Desa Suka Mulya Desa yang terdapat di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang memiliki wilayah perkebunan yang luas yang berpotensi bagi pengembangan agro industri dan agrowisata khususnya pengolahan CPO (*Crude Palm Oil*) atau minyak kelapa sawit. Mayoritas penduduk menjadi petani yang memiliki kebun sawit, menjadikan perkebunan sawit menjadi suatu usaha pokok yang dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Hanya saja tidak semua penduduk di sini mempunyai lahan ataupun kebun sawit. Sehingga mereka harus bekerjasama dengan orang yang memiliki perkebunan kelapa sawit.

Luas lahan sawit yang terdapat di Desa Teluk Merbau, Desa Dayun Dan Desa Suka Mulya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 : Jumlah Luas Lahan Sawit Tahun 2013-2017

Desa Teluk Merbau		
Tahun	Luas Tanah (Ha)	Jumlah Panen (Ton)
2013	95,25	112,32
2014	86,1	95,87
2015	106,05	115,08
2016	134,82	137,07
2017	115,33	117,95

Desa Dayun		
Tahun	Luas Tanah (Ha)	Jumlah Panen (Ton)
2013	208,38	195,02
2014	197,21	176,32
2015	164,55	169,01
2016	181,2	200,71

Desa Suka Mulya		
Tahun	Luas Tanah (Ha)	Jumlah Panen (Ton)
2013	87,52	90,24
2014	134,06	129,38
2015	101,70	90,79
2016	91,93	81,48
2017	117,84	118,06

Sumber: Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak, 2017

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa luas tanah dan jumlah panen setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini disebabkan adanya peremajaan dimana pohon sawit yang sudah berumur lebih dari 15 tahun akan dilakukan penumbangan / penebangan dikarenakan buah yang dihasilkan sedikit dan sangat sulit dijangkau oleh pemanen karna pohon sawit yang semakin tinggi dan alat panen yang tidak memadai. Pemberlakuan penebangan tersebut tentu saja tergantung oleh pemilik lahan. Jika pemilik lahan ingin meningkatkan hasil panen maka salah satunya harus melakukan peremajaan.

Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini ada dua macam yaitu sistem upah yang dibayarkan pemilik kebun sawit kepada pemanen dan sistem bagi hasil. Untuk sistem upah, pemilik kebun membayarkan upah

pemanen sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan berlaku hanya untuk sekali panen. Pemilik kebun saat akan melakukan panen menyepakati biaya upah yang akan dibayar kepada pemanen atau penggarap sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan bagi hasil akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. dengan demikian dalam melakukan hubungan kerjasama dapat menimbulkan suatu persoalan hukum mengenai hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban bagi pemilik kebun antara lain :

Sedangkan hak bagi pemilik lahan.

1. Pemilik menyediakan alat-alat seperti : dodos, egrek, gerobak, gancu dan lain lain
2. Sedangkan hak bagi pemilik kebun adalah menerima hasil dari garapannya.

Sedangkan kewajiban bagi penggarap antara lain

1. Melakukan penggarapan secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dan menghindari kecerobohan dalam melakukan penyadap yang menyebabkan kerusakan atau kematian.
2. Memberikan hasil garapan kepada pemilik sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, penulis menemukan beberapa fenomena yang berkaitan dengan sistem bagi hasil yaitu :

1. Kurangnya transparasi keuntungan lahan oleh pemilik lahan dan pengelola/ penggarap.

2. Pemilik lahan selalu bebas untuk memberhentikan atau memutuskan hubungan kerja sama dengan pengelola / penggarap kebun sawit.
3. Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap) hanya didasarkan rasa kepercayaan kesepakatan secara lisan.
4. Pengelola merasa di rugikan dengan sistem bagi hasil karena tidak sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, jelas terlihat perjanjian bagi hasil ini bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Bahkan Nabi Saw dan begitu pula para sahabat pernah mengadakan perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian.

Bagi hasil tanah perkebunan dalam Islam sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fiqih, pengelolaannya dilakukan dengan beberapa macam cara yang dikenal dengan istilah *muzara'ah*, *mudharabah*, *musaqah* dan *musyarakah*. Itu merupakan sebagian bentuk dari *aqad* atau transaksi muamalah Islam dalam bidang pemanfaatan tanah. Atas dasar keterangan di atas, maka kerja sama dengan sistem bagi hasil diakui keberadaannya dalam agama Islam dan bila dapat dilaksanakan dengan ketentuannya tentu akan dapat membantu pihak yang melaksanakannya.

Pembagian hasil produksi juga merupakan salah satu langkah yang inovatif dalam transaksi ekonomi Syariah, hal tersebut dapat terjadi apabila kesepakatan kerjasama sesuai dengan perilaku masyarakat, lebih dari itu kesepakatan pembagian hasil produksi merupakan langkah keseimbangan sosial antara kedua belah pihak dalam memperoleh kesempatan untuk melakukan

kegiatan usaha yang produktif. Dari hasil pengamatan peneliti pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak biasanya pengelola hanya mendapatkan bagian $\frac{1}{5}$ dari hasil panen kelapa sawit dan pemilik mendapatkan $\frac{4}{5}$ dari hasil panen kelapa sawit dengan adanya pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Dayun penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih mendalam dan luas dengan melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau.”**

B. Pembatasan Masalah

Di kecamatan Dayun terdiri dari 11 Desa dimana ada Desa Banjar Seminai, Desa Berumbung Baru, Desa Buana Makmur, Desa Dayun, Desa Lubuk Tilan, Desa Merangkai, Pangkalan Makmur, Sawit Permai, Sialang Sakti, Suka Mulya dan Desa Taluk Merbau dimana dari 11 Desa hanya 1 Desa yang dijadikan sampel karena Desa Dayun yang paling padat penduduknya sekaligus desa yang paling banyak menerapkan sistem kerjasama bagi hasil.

C. Rumusan Masalah

Bagaimanakah tinjauan fiqih muamalah pelaksanaan kerjasama bagi hasil kelapa sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah, bagaimana pelaksanaan kerjasama tentang bagi hasil di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (SI) pada Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai bahan masukan bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dalam membuat suatu karya ilmiah.
- c. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan sebagai perbandingan antara teori yang diperoleh dengan penerapannya di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit.
- d. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian dan informasi bagi masyarakat dalam melakukan kesepakatan kerjasama bagi hasil kelapa sawit.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulis penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kerangka teoritis yang digunakan dalam mendukung penulisan skripsi ini. Adapun yang terdapat dalam kerangka teoritis adalah landasan teori yang menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai tinjauan/ landasan dalam menganalisis rumusan masalah yang telah dikemukakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan data, Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian, karakteristik Responden dan Perjanjian Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, Serta Pembahasan Hasil Penelitian Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Dayun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari Kesimpulan Dan Saran.